

# Pengadaan Secara Elektronik Bagi Pemula

# Pengertian SPSE

SPSE merupakan aplikasi PBJ secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan pada K/L/PD di seluruh Indonesia



# Kewajiban PBJ Secara Elektronik

Pasal 69 ayat (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

# PBJPemerintah Secara Elektronik

## Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

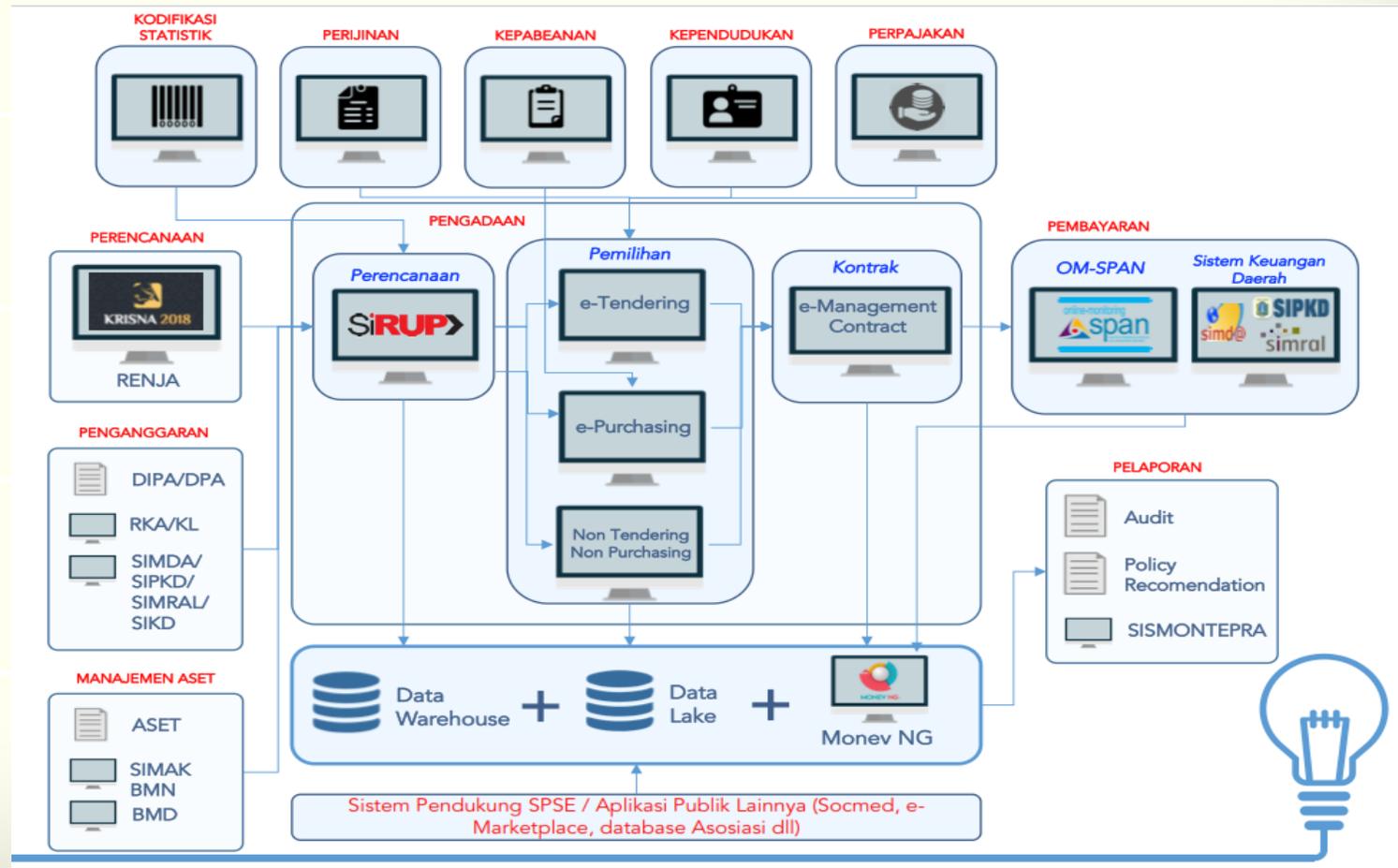
- Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
- *e-Marketplace*

## Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)



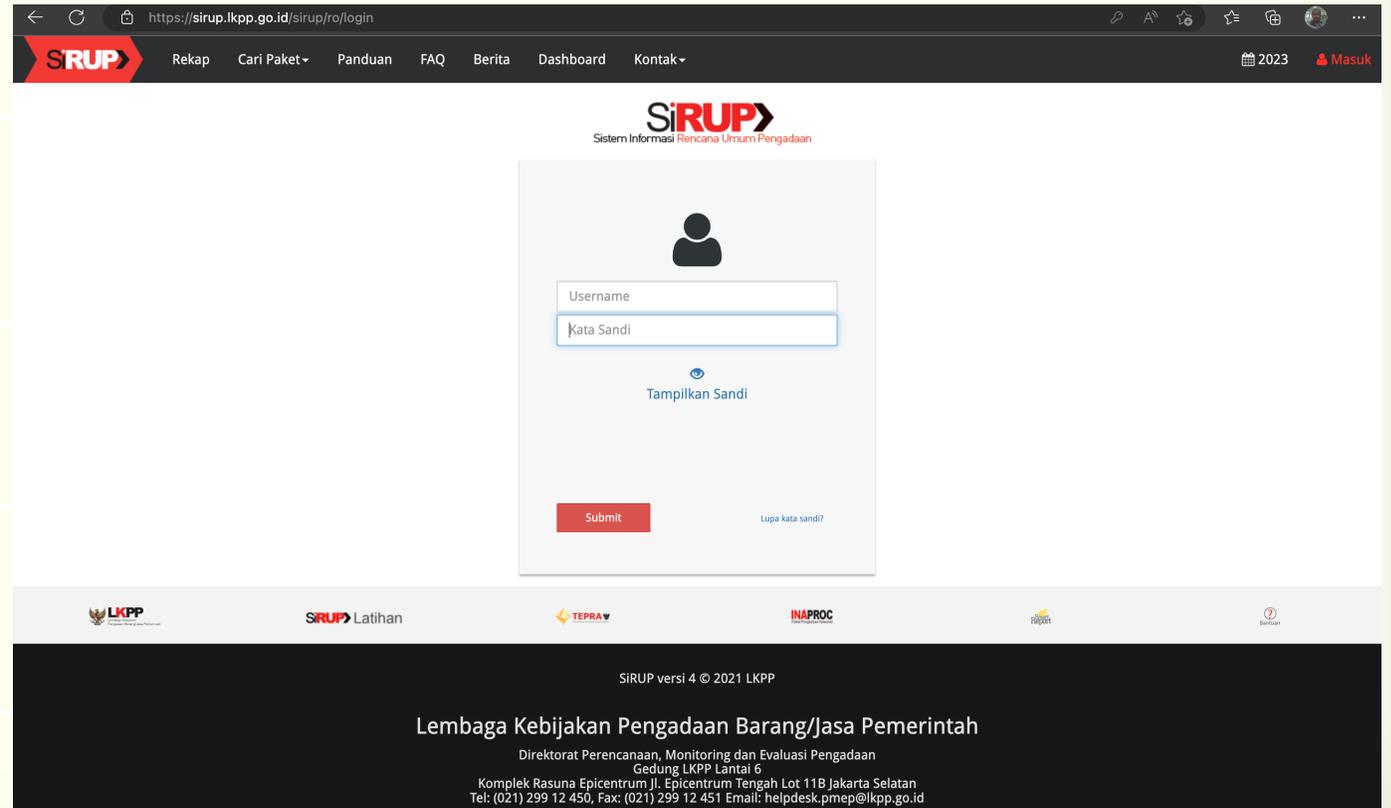
# Ruang Lingkup PBJ Secara Elektronik

1. Perencanaan Pengadaan
2. Persiapan Pengadaan
3. Pemilihan Penyedia
4. Pelaksanaan Kontrak
5. Serah Terima Pekerjaan
6. Pengelolaan Penyedia
7. Katalog Elektronik



# Ruang Lingkup PBJ Secara Elektronik

1. Perencanaan Pengadaan
2. Persiapan Pengadaan
3. Pemilihan Penyedia
4. Pelaksanaan Kontrak
5. Serah Terima Pekerjaan
6. Pengelolaan Penyedia
7. Katalog Elektronik



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa. Alamat  
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat  
Phone +62 (545) 455564

[www.bagianpbj.kutaiarakab.go.id](http://www.bagianpbj.kutaiarakab.go.id)

[bagianpbj@kutaiarakab.go.id](mailto:bagianpbj@kutaiarakab.go.id)

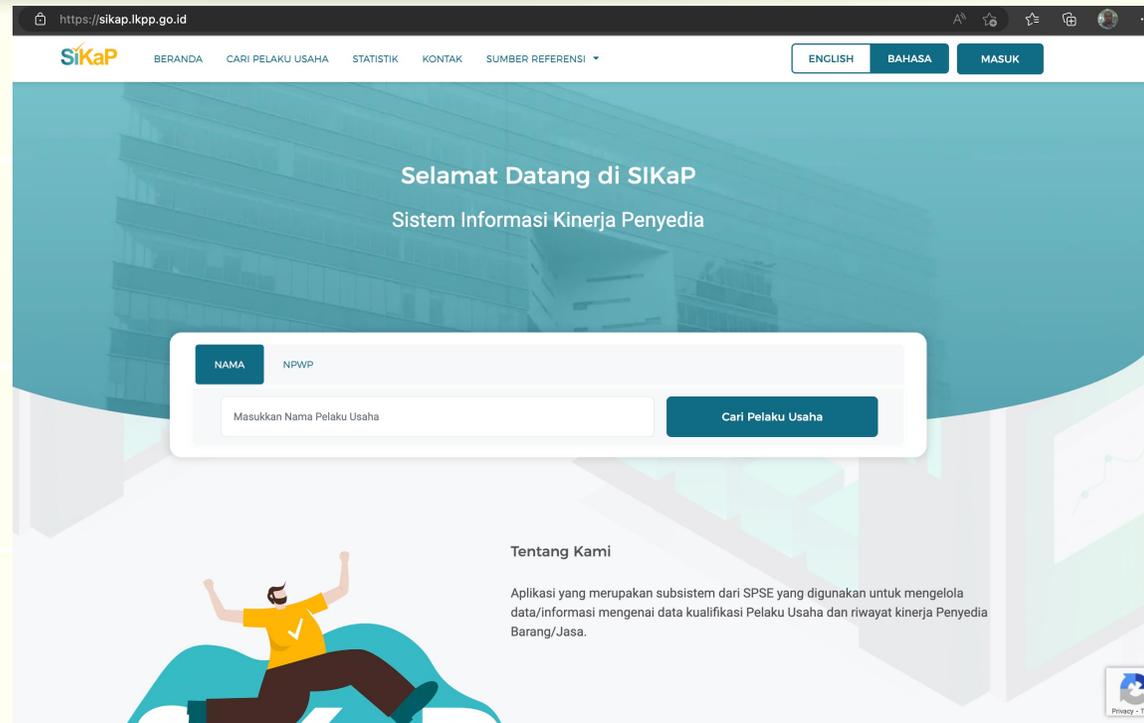
# Ruang Lingkup PBJ Secara Elektronik

1. Perencanaan Pengadaan
2. Persiapan Pengadaan
3. Pemilihan Penyedia
4. Pelaksanaan Kontrak
5. Serah Terima Pekerjaan
6. Pengelolaan Penyedia
7. Katalog Elektronik



# Ruang Lingkup PBJ Secara Elektronik

1. Perencanaan Pengadaan
2. Persiapan Pengadaan
3. Pemilihan Penyedia
4. Pelaksanaan Kontrak
5. Serah Terima Pekerjaan
6. **Pengelolaan Penyedia**
7. Katalog Elektronik



# Ruang Lingkup PBJ Secara Elektronik

1. Perencanaan Pengadaan
2. Persiapan Pengadaan
3. Pemilihan Penyedia
4. Pelaksanaan Kontrak
5. Serah Terima Pekerjaan
6. Pengelolaan Penyedia
7. Katalog Elektronik

The screenshot displays the LKPP E-Catalogue website interface. At the top, the URL is <https://e-katalog.lkpp.go.id>. The main header features the LKPP logo and the text "Katalog Elektronik v.5.0". Below the header, there are six red navigation buttons: Nasional, Lokal, Sektoral, UMKK, Inovasi, and TKDN. The main content area is titled "Pengumuman" and contains four announcement cards. Each card includes a category (Lokal or Sektoral), a title, a description of the product, and the start and end dates.

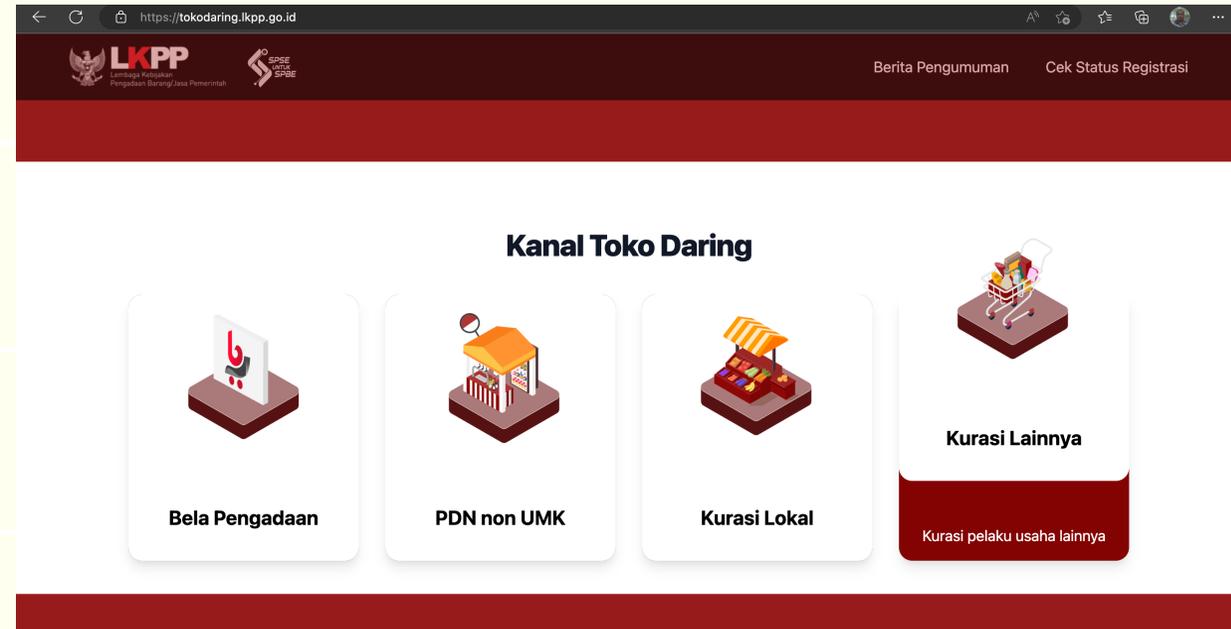
Kategori	Judul Pengumuman	Etalase Produk	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir
Lokal	Pendaftaran Penyedia Souvenir Pemerintah Daerah Ka...	Souvenir Pemerintah Daerah Kab...	4 Agustus 2022	
Lokal	Pendaftaran Penyedia Souvenir Pemerintah Daerah Ka...	Souvenir Pemerintah Daerah Kab...	4 Agustus 2022	
Sektoral	Pendaftaran Sewa Peralatan Elektronik Badan Pengu...	Sewa Peralatan Elektronik Bada...	9 Februari 2023	31 Desember 2023
Lokal	Pendaftaran Pencantuman Etalase Beton Provinsi DKI...	Beton Provinsi DKI Jakarta	23 Juni 2022	



# Toko Daring

Pasal 1 angka 54

Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.



**Toko Daring pada PBJ Pemerintah Bukanlah:**

Bukan e-Commerce umum yang dapat di akses secara konvensional non-Pemerintah

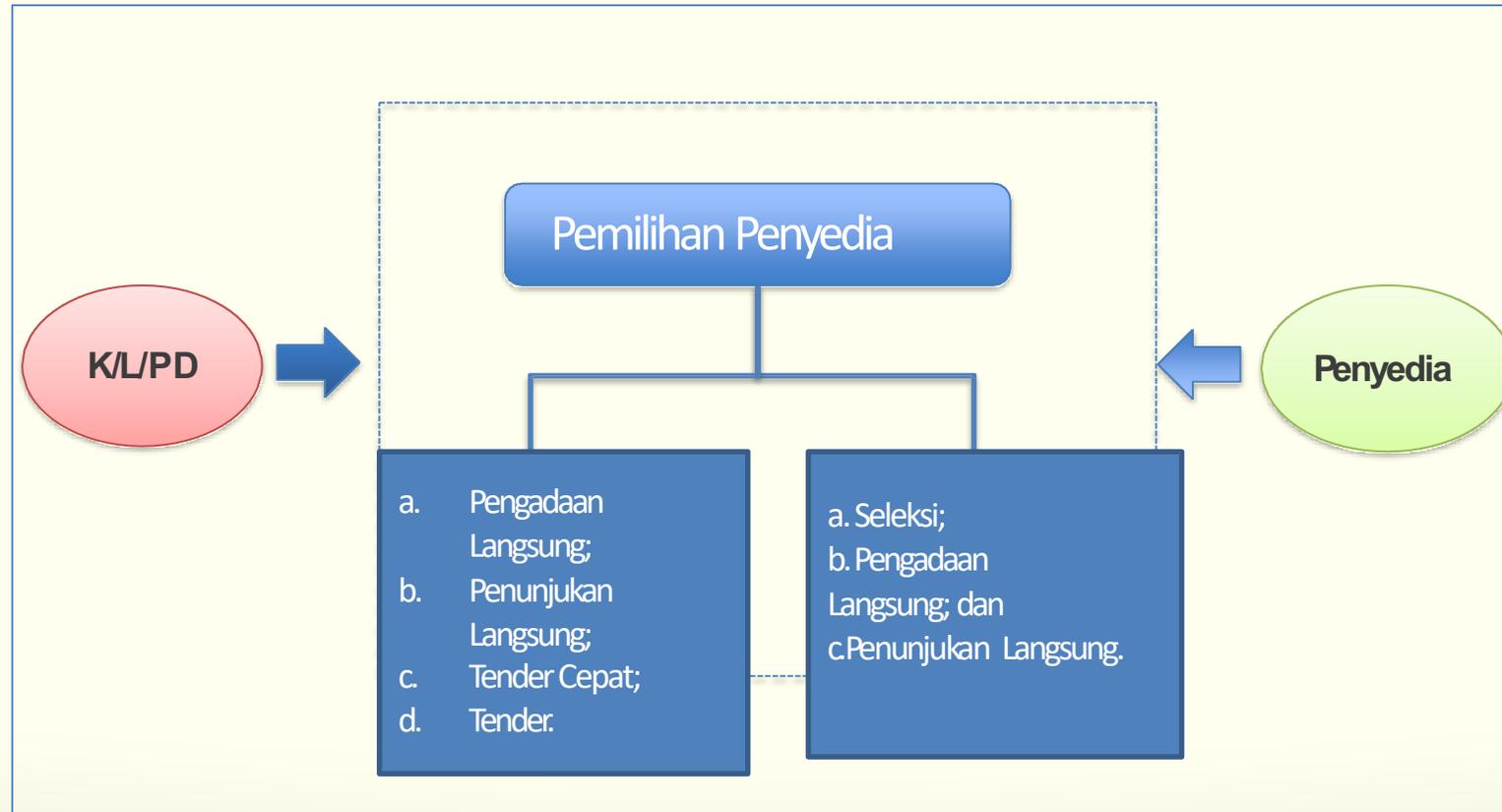


## Diskusi

E-Marketplace PBJP terdiri atas Katalog Elektronik, Toko Daring, dan Pemilihan Penyedia, apa yang membedakan dan kapan penggunaan dari tiap pilihan dalam E-Marketplace tersebut?



# Pemilihan Penyedia



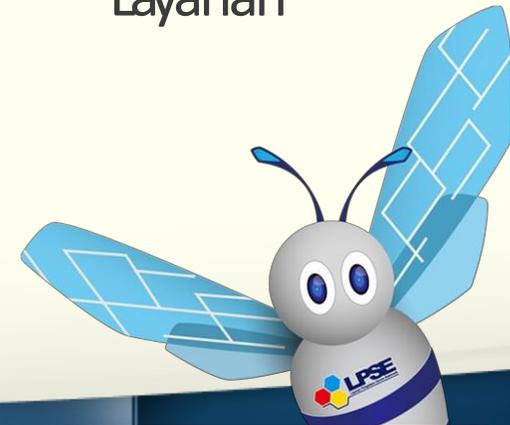
# Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

- K/L/PD menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
- K/L/PD yang belum mempunyai LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
- LPSE memfasilitasi Pelaku Pengadaan (Pejabat Pengadaan, PPK, Pelaku Usaha/Penyedia, dsb).

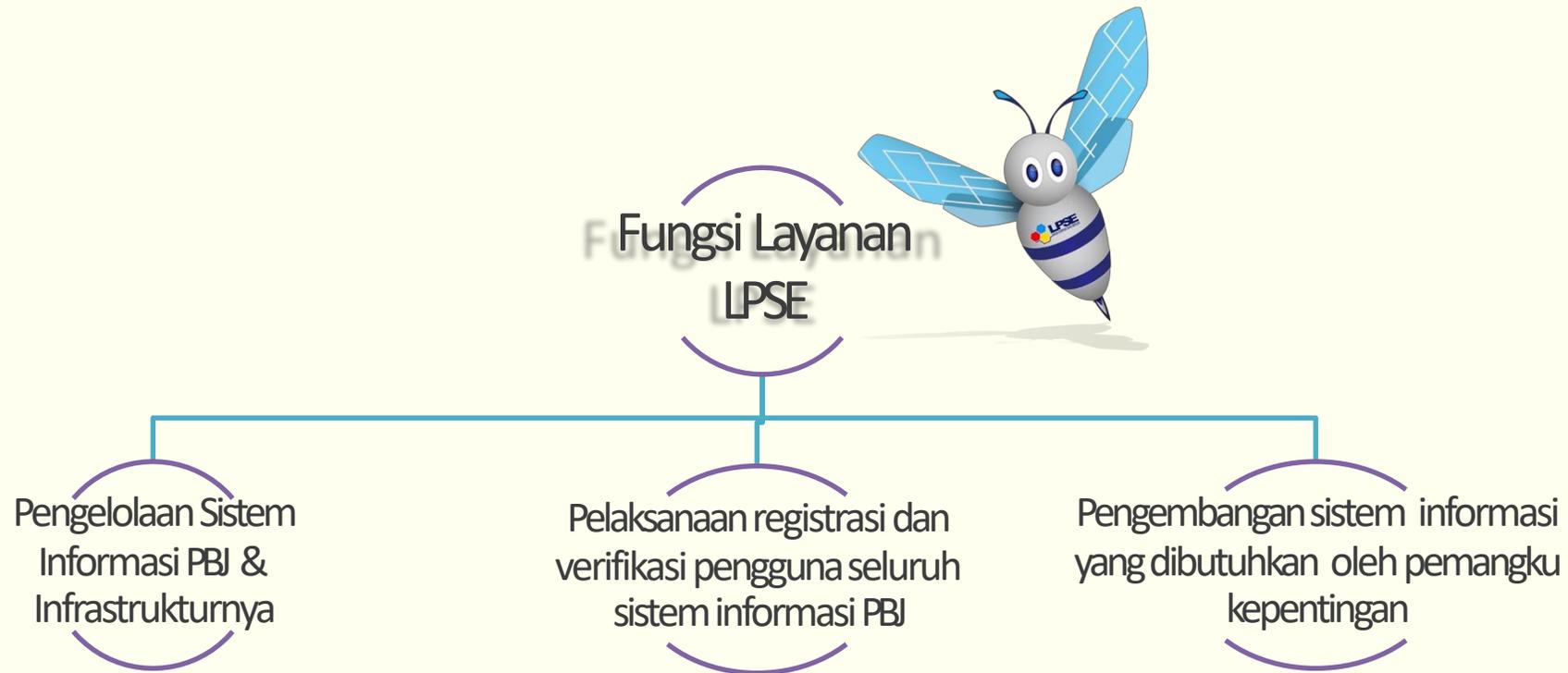


# Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

- LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.
- Ketentuan teknis operasionalnya meliputi standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan pengawasan terhadap Layanan Pengadaan Secara Elektronik dilakukan oleh LKPP



# Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)



# Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

No	Nama Paket	HPS	Akhir Pendaftaran
<b>Pengadaan Barang</b> <span>0</span>			
<b>Jasa Konsultasi Badan Usaha</b> <span>4</span>			
1	Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Tanjung Isuy - Mancong (DAK Fisik) <b>spse 4.3</b>	Rp 322,6 Jt	04 April 2019 16:00
2	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Penyusunan Database BMD Berbasis GIS <b>spse 4.3</b>	Rp 550 Jt	15 April 2019 12:00
3	Pengawasan Peningkatan Jalan Lakan Bilem - Intu Lingau <b>spse 4.3</b>	Rp 149,6 Jt	10 April 2019 16:00
4	Perencanaan Pembangunan Turap Jalan Poros Kampung Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok <b>spse 4.3</b>	Rp 240 Jt	12 April 2019 16:00
<b>Pekerjaan Konstruksi</b> <span>11</span>			
1	Peningkatan Jalan Dalam Ibu Kota Kec. Penyinggahan (Bankeu Provinsi TA 2019) <b>spse 4.3</b>	Rp 3,8 M	09 April 2019 15:00
2	Rehabilitasi Daerah Irigasi Sukumulyo (DAK Penugasan) <b>spse 4.3</b>	Rp 1,1 M	09 April 2019 15:00
3	Rehabilitasi Daerah Irigasi Dempar (DAK Penugasan) <b>spse 4.3</b>	Rp 1,2 M	09 April 2019 15:00

**Pengumuman dan Berita »**

- 27 Maret 2019 10:37  
Undangan Pelatihan SPSE versi 4.3
- 12 September 2018 08:52  
Undangan Klarifikasi dan Negosiasi - Belanja Modal Pengadaan Mobil Dinas Jabatan Bupati Kutai Barat
- 03 September 2018 18:02  
Spesifikasi Teknis dan Gambar - Paket Pengadaan Mobil Jabatan Bupati Kutai Barat
- 03 September 2018 18:02  
Dokumen Pengadaan - Paket Pengadaan Mobil Jabatan Bupati Kutai Barat
- 03 September 2018 18:02  
Undangan Penunjukan Langsung - Paket Pengadaan Mobil Jabatan Bupati Kutai Barat
- 12 Mei 2017 17:17  
Pengumuman Hasil Lelang Cepat jasa publikasi pemerintahan

<http://lpse.kutaibaratkab.go.id/>



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa. Alamat  
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat  
Phone +62 (545) 455564

[www.bagianpbj.kutaibaratkab.go.id](http://www.bagianpbj.kutaibaratkab.go.id)  
[bagianpbj@kutaibaratkab.go.id](mailto:bagianpbj@kutaibaratkab.go.id)



Sumber Daya  
Manusia PBJ



Pengembangan  
Kompetensi SDM  
PBJ

# Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengelola Barang/Jasa



SDM Pengadaan di atas:

- memiliki kompetensi di bidang PBJ
- Berkedudukan di UKPBJ

\* Pengelola PBJ adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan PBJ

\* Pengelola PBJ dengan Jenjang: Pertama, Muda, Madya

Personel lainnya adalah ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan PBJ

# PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PBJ

## Standar Kompetensi Kerja PBJ



Deskripsi tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang di tempat kerja dalam PBJ

*APA yg dikerjakan??*



Deskripsi tentang sejauh mana kinerja yang diharapkan dapat ditampilkan oleh seorang pelaku PBJ sesuai dengan tugas pekerjaan serta kondisi dan lingkungan kerjanya.

*KINERJA yang diharapkan??*



Deskripsi tentang bagaimana caranya mengetahui/ mengukur bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, seseorang telah atau belum mampu menampilkan kinerja yang diharapkan

*Pengukuran KINERJA??*

# PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PBJ

## Standar Kompetensi PBJ



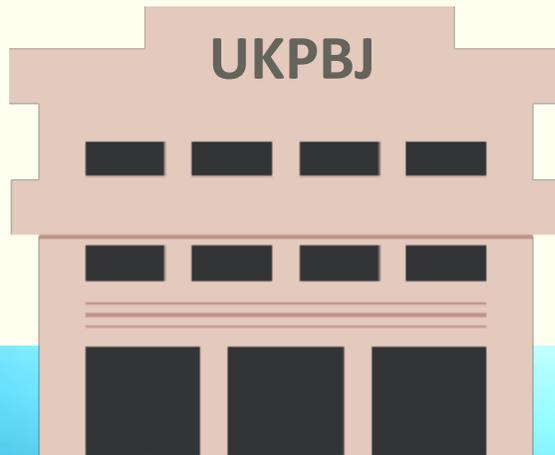
Kompetensi Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Memilih Penyedia Barang/Jasa;
3. Mengelola Kontrak PBJP; dan
4. PBJP melalui Swakelola

## Standar Kompetensi Bagi Personel Lainnya

- ✓ Standar Kompetensi PPK;
- ✓ Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan;
- ✓ Standar Kompetensi Pokja Pemilihan;
- ✓ Standar Kompetensi Kepala UKPBJ; dan
- ✓ Standar Kompetensi Pengelola LPSE.

# KELEMBAGAAN PBJ



Menteri/Kepala  
Lembaga/Kepala Daerah  
membentuk UKPBJ (Unit Kerja  
PBJ), berbentuk struktural

## Tugas UKPBJ

- Menyelenggarakan dukungan PBJ

## Fungsi UKPBJ

- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
- Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah

# APIP



Pengawasan oleh APIP dapat dilakukan melalui kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.

Ruang Lingkup Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi :

- a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
- b. kepatuhan terhadap peraturan;
- c. pencapaian TKDN;
- d. penggunaan produk dalam negeri;
- e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan Pengadaan Berkelanjutan.



# Sanksi Dalam PBJP

## Daftar Hitam Nasional

1. Peserta Pemilihan
2. Pemenang Pemilihan/Penyedia

## Sanksi Administratif

1. Pelaku PBJP dari K/L/PD-Pemda  
(PA/KPA/PPK/Pokmil/PP)
2. Penyelenggara Swakelola

### Layanan Hukum Pelaku PBJ

1. Pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/PP/Pokja Pemilihan) yang terkena permasalahan hukum terkait PBJ **wajib** diberikan pelayanan hukum oleh K/L/Pemda
2. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan
3. Penyedia, ormas, pokmas penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha sebagai Agen Pengadaan tidak termasuk dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapatkan pelayanan hukum dari K/L/Pemda

### Penyelesaian Sengketa Kontrak

Layanan Penyelesaian sengketa (LPS) kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui: LPS LKPP (Rekonsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase), Arbitrase (BANI, BADAPSKI, dst), Dewan Sengketa Konstruksi (diatur oleh KemenPUPR); atau Penyelesaian melalui pengadilan

### Pembinaan Pelaku Usaha

1. Sanksi adalah Langkah terakhir, Pembinaan adalah upaya utama untuk meningkatkan kapasitas Penyedia sebagai salah satu Pelaku Pengadaan
2. pembinaan kepada Penyedia meliputi: Pemberian peningkatan kapasitas Pelaku Usaha, Pemberian dukungan, Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa; kemudian terakhir adalah Pengenaan Sanksi Daftar Hitam

## Diskusi Kasus

Walau Proses Pengadaan Barang/Jasa telah dilakukan secara Elektronik, mengapa masih perlu dilakukan penerimaan dan diberikan sarana untuk melakukan Pengaduan?



Terimakasih